

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Identifikasi Permasalahan

Menurut (Adhisasmita,2005) “Kondisi krisis yang pernah terjadi telah menyebabkan Indonesia mengalami permasalahan serius khususnya di bidang ekonomi hal ini terjadi karena menurunnya kinerja neraca pembayaran, nilai rupiah yang terus tertekan serta adanya dorongan terhadap laju inflasi”. Akibatnya angka kemiskinan kembali mengalami lonjakan di Indonesia dampak dari krisis yang terjadi. “Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi permasalahan dasar dan pusat perhatian di Negara manapun” (Susilowati, 2008). Kemiskinan bukan hanya permasalahan yang terjadi pada Negara berkembang saja, namun Negara maju dengan kekayaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusiapun tidak akan terlepas dari yang namanya permasalahan kemiskinan (Christine, 1998).

Di Indonesia kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang sampai saat ini masih belum mampu ditekan secara maksimal. Hingga saat ini ada sekitar 25 juta orang rakyat Indonesia yang masih belum mendapatkan hak mereka secara penuh, yaitu hak untuk hidup yang layak, mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah belum mampu memberikan efektivitas ataupun belum tepat sasaran untuk menekan angka kemiskinan.

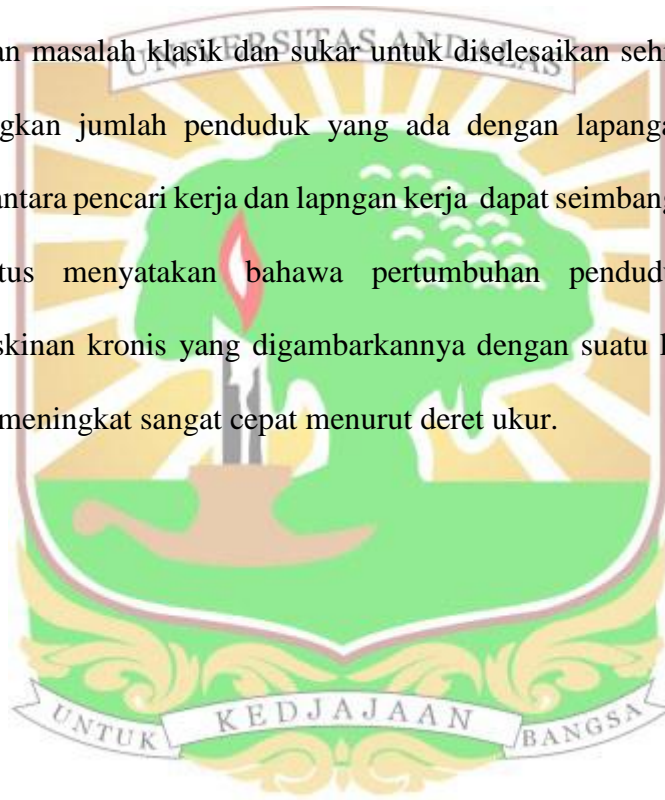
Ada beberapa hal yang akan mampu memberikan pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan, salah satunya adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat untuk mencapai pembangunan ekonomi, namun yang diperhatikan bukan hanya seberapa besaran laju pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih kepada siapa

yang menciptakan pertumbuhan tersebut apakah hanya sebagian orang atau sebagian besara masyarakat yang ikut berperan. Jika hanya sebagian kecil masyarakat saja yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi itu artinya pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, namun sebaliknya jika sebagian besar orang berperan dalam pertumbuhan ekonomi maka dapat dikatakan gap kemiskinan dapat direduksi dan ketimpangan antara kaya dan miskin dapat diperkecil (Todaro,2006). Oleh karena itu pemerintah harus melakukan koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi agar permasalahan ini tidak menjadi permasalahan ekonomi bangsa ini dimasa depan.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada pada kisaran 5-6% dalam satu dekade terakhir, namun hal itu belum mampu memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal lain yang lebih mengejutkan yaitu dengan meningkatnya angka kemiskinan juga diperparah dengan melonjaknya angka ketimpangan. Maka sudah jelaslah Indonesia sangat butuh strategi yang lebih efektif agar permasalahan ini dapat dientaskan. Berdasarkan data dan informasi yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik tentang kemiskinan Kabupatem/Kota ada beberapa program pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan yaitu (1) program bantuan beras bagi keluarga miskin (program Rastra) program ini merupakan program pemberian beras sejahtera kepada rumah tangga miskin yang dilakukan tiap bulannya. Program Rastra ini sebelumnya disebut dengan nama program beras miskin atau Raskin yang tujuan utamanya yaitu untuk menunjang ekonomi dan meringankan beban para penerima bantuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya beras. (2) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program bantuan yang disalurkan oleh pemerintah dalam bentuk non tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektornik yang digunakan untuk

membeli bahan pangan di pedagang pangan atau disebut dengan E-warong yang bekerja sama dengan Bank penyalur. Bahan pangan yang disediakan program ini meliputi beras dan telur.

Telah banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Pembangunan nasional adalah suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang pada dasarnya mempunyai dua sasaran pembangunan nasional yakni pengentasan pengangguran serta kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah klasik dan sukar untuk diselesaikan sehingga pemerintah harus mampu menyeimbangkan jumlah penduduk yang ada dengan lapangan kerja yang tersedia sehingga diharapkan antara pencari kerja dan lapangan kerja dapat seimbang seperti yang dikatakan oleh Malthus. Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat akan mengakibatkan kemiskinan kronis yang digambarkannya dengan suatu kecendrungan universal bahwa populasi akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur.



Gambar 1.1 presentase penduduk miskin menurut pulau



Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa presentase penduduk miskin tertinggi berada pada pulau Maluku dan Papua dan yang terendah berada dipulau Kalimantan sedangkan dari segi jumlah sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (13,34 juta orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,98 juta orang). Adapun dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera masih tergolong tinggi karena rata-rata angka kemiskinan di Pulau Sumatera masih diatas rata-rata kemiskinan tingkat nasional. Kemiskinan di Pulau Sumatera berada diangka 10,44 persen, sedangkan rata-rata angka kemiskinan nasional berada pada angka 10,22 persen.

Permasalahan terkait kemiskinan bukan hanya sebatas presentase penduduk miskin, tetapi lebih dari itu hal lain yang harus di perhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan itu sendiri. Selain harus mampu menurunkan jumlah penduduk miskin, kebijakan yang dilakukan pemerintah juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Masing-masing wilayah yang ada di Indonesia berbeda dalam hal keparahan dan keberagaman tingkat kemiskinan, sehingga penganggran dana untuk mengatasi masalah kemiskinan harus

mempertimbangkan faktor tersebut. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, itu artinya akan semakin jauh pula rata rata pengeluaran masyarakat dari garis kemiskinan yang ada. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan bisa menunjukkan bagaimana pengeluaran kelompok termiskin di suatu wilayah dibandingkan dengan pengeluaran rata rata penduduk miskin di wilayah tersebut. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya, maka harus semakin terukur dan tepat sasaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk daerah tersebut keluar dari kemiskinan.

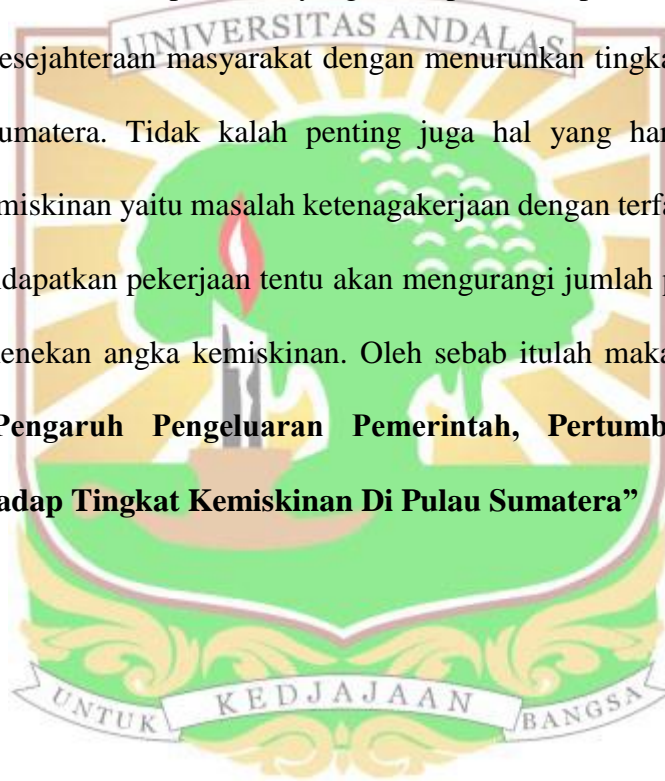
Tingkat kedalaman ini mempengaruhi seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat seseorang keluar dari kemiskinan. Berikut adalah data indeks kedalaman kemiskinan di Sumatera:

Tabel 1.1

Indeks Kedalaman Kemiskinan Penduduk di Sumatera 2015-2019

PROVINSI	2015		2016		2017		2018		2019
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)
ACEH	3.10	3.11	3.48	3.06	2.98	2.92	2.85	2.80	2.64
SUMATERA UTARA	1.65	1.89	1.77	1.96	1.71	1.50	1.56	1.46	1.37
SUMATERA BARAT	0.98	1.26	1.10	1.12	1	0.99	1.04	0.96	0.94
RIAU	1.38	1.45	1.36	1.36	1.32	0.96	1.20	1.05	1.13
LAMPUNG	1.42	1.60	1.47	1.42	1.28	0.99	1.30	1.26	1.23
SUMATERA SELATAN	2.46	1.88	2.02	1.96	2.24	2.40	2.33	2.06	2.12
BENGKULU	3.48	3.63	3.14	2.79	2.85	2.76	2.59	2.35	2.48
LAMPUNG	2.36	2.36	2.63	1.92	2.16	2.11	2.04	2.06	1.93
KEP. BANGKA SELITUNG	0.67	0.90	0.67	0.75	0.49	0.57	0.69	0.73	0.51
KEP. RIAU	0.97	0.86	0.89	0.71	0.97	1.18	1	0.59	0.69

Tabel 1.1 tersebut bisa menjelaskan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di pulau sumatera mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Peranan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dapat kita lihat dari besaran realisasi pembelanjaan APBD tiap tahunnya terutama dalam realisasi pengeluaran pemerintah dibagian belanja modal dan belanja bantuan sosial. Hal lain yang juga mempunyai peran besar yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi di pulau sumatera yang diharapkan dapat menekan angka kemiskinan. Belanja modal, belanja bantuan sosial serta pertumbuhan ekonomi adalah merupakan hal yang diharapkan mampu menyentuh secara langsung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Pulau Sumatera. Tidak kalah penting juga hal yang harus diperhatikan untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu masalah ketenagakerjaan dengan terfasilitasinya tenaga kerja khususnya untuk mendapatkan pekerjaan tentu akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada dan akhirnya akan menekan angka kemiskinan. Oleh sebab itulah maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Pulau Sumatera”**



1. 2. Perumusan Masalah

Seperti yang kita lihat masalah kemiskinan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan hampir di semua Daerah termasuk di Pulau Sumatera. Jadi rumusan masalah yang dapat kita ambil yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera ?
2. Bagaimana Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan di 10 Provinsi di Pulau Sumatera ?
3. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di 10 Provinsi di Pulau Sumatera ?
4. Bagaimana Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di 10 Provinsi di Pulau Sumatera ?

1. 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk Menganalisa Bagaimana Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Untuk Menganalisa Bagaimana pengaruh Bantuan Sosial terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di 10 Provinsi Pulau Sumatera.
3. Untuk Menganalisa Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
4. Untuk Menganalisa Bagaimana Pengaruh Angka Pengangguran Terhadap Kemiskinan yang ada di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.



1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis berharap akan ada dampak dan manfaat untuk berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, seperti :

1. Guna meningkatkan wawasan serta mampu di implikasikan dibidang ilmu ekonomi terutama dalam kajian ilmu ekonomi ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia
2. Hasil penelitian bisa berkontribusi dalam hal ide-ide, atau bahan studi tambahan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan ilmu ekonomi.
3. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat kebijakan dalam pemerintahan.
4. Sebagai sumber bagi pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan kasus-kasus yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan ini tersusun dari 5 bab, yang mana masing-masing bab mampu memberikan gambaran dari penulisan ini. Secara ringkas penulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. BAB I : Di dalam BAB I ini terdiri dari beberapa bagian sub bab, yaitu : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.
2. BAB II : BAB ini berisikan kerangka teori yang berisikan teori rujukan utama mengenai tiap variabel, penelitian terdahulu beserta kerangka penelitian.

3. BAB III : Di dalam BAB ini adalah membahas mengenai metodologi penelitian dengan sub bab berisikan waktu,tempat dan metode penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data beserta teknik analisis data.
4. BAB IV : merupakan Hasil dari penelitian yang isinya hasil analisis, interpretasi hasil dan pengujian data.
5. BAB V : merupakan ringkasan kesimpulan dan saran yang berisikan sintesis, implikasi dan rekomendasi penelitian.

